

**Judul** : KPK ulik dugaan korupsi LNG Pertamina dari Dahlan Iskan  
**Tanggal** : Jumat, 08 September 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## KPK Ulik Dugaan Korupsi LNG Pertamina dari Dahlan Iskan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil menteri badan usaha milik negara (BUMN) periode 2011-2014 sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina 2011-2014.

"Hari ini bertempat di ACLC KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dahlan Iskan selaku menteri BUMN periode 2011-2014," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut apa yang akan dialami penyidik kepada Dahlan Iskan.

Ketua KPK Firli Bahuri pada Juni 2022 mengumumkan

pihaknya sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina 2011-2014. Namun, sampai saat ini pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan. Begitu juga, belum dilakukan upaya paksa penahanan.

Dalam proses penyidikan suatu kasus, Firli mengatakan KPK mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus LNG tersebut.

"Sekali lagi, ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang, mencari, mengumpulkan

keterangan, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana, baru kami temukan tersangkanya," ucap Firli ketika itu.

Kemudian, pada awal 2023, Firli kembali menegaskan proses penyidikan kasus tersebut masih berjalan. "Terkait dengan LNG, saya katakan ini masih dalam proses penyidikan," kata Firli, Selasa (3/1).

Dalam kasus lain di BUMN, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022. Teranyar, dua saksi diperiksa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, kemarin,

menyampaikan kedua saksi yang diperiksa ialah HBA selaku Kepala Divisi Treasury PT Antam Tbk dan AHA selaku General Manager PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) periode Agustus 2017 Februari 2019.

Kedua saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas 2010-2022.

Dugaan korupsi terkait dengan komoditas emas tersebut ditaksir merugikan negara hingga Rp47,1 triliun.

Penyidik telah menggeledah sejumlah tempat terkait dengan kasus itu. Ketut menerangkan salah satu lokasi penggeledahan merupakan kantor Bea Cukai. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail kantor Bea Cukai mana yang jadi target penggeledahan penyidik Kejagung. (Ant/Ykb/P-2)

di persidangan yang sama meminta batas usia capres-cawapres diturunkan menjadi paling rendah 21 tahun. Perkara tersebut diajukan seorang warga negara Indonesia bernama Guy Rangga Boro.

Ia menyajikan perbandingan sejumlah perundang-undangan. Misalnya, KUHPdata yang menyebutkan dewasa ialah genap 21 tahun atau sudah kawin sebelumnya.

Riko Andi Sinaga sebagai perseorangan warga negara dalam permohonan Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023 juga meminta batas minimal capres dan cawapres diturunkan. Namun, ia mengajukan usia minimal 25 tahun.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta pemohon memberikan argumentasi atas usia-usia yang dikehendaki. "Kenapa usia 21 tahun tidak bertentangan dengan UUD 1945? Yang (meminta) 25 tahun maka carikan alasannya. Ini nanti hakim akan menilai ini," (Van/P-2)